



LAPORAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

VOTER IMPACT ON DPR RI CONSERVATION POLICY

24 September 2025

Tangerang, Provinsi Banten



LAPORAN
FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD)

VOTER IMPACT ON DPR RI CONSERVATION POLICY

24 September 2025
Tangerang, Provinsi Banten



Laporan
Focus Group Discussion (FGD)
Voter Impact on DPR RI Conservation Policy
24 September 2025
Tangerang, Provinsi Banten

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riset opini publik terbaru yang didukung oleh ICCF Group menunjukkan bahwa pemilih Indonesia semakin menempatkan konservasi, khususnya kesehatan laut, sebagai isu penting, dan faktor ini memengaruhi cara mereka menilai calon anggota DPR-RI. Survei ini menegaskan bahwa isu lingkungan dan kelautan bukan hanya sekadar isu teknis, melainkan isu yang memiliki relevansi isu politik nyata di mata pemilih.

Kondisi ini membuka peluang, sekaligus menegaskan peran bagi DPR-RI, khususnya anggota Kaukus Konservasi, untuk memberikan respons melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Voter Impact on DPR RI Conservation Policy diselenggarakan atas kerja sama BKSAP DPR RI dengan Kaukus Konservasi (ICCF Group) dan Indikator Politik Indonesia. Dimana, Panelis akan menyampaikan temuan utama dari survei yang dilakukan pada pertengahan 2024 dengan fokus utama untuk melihat bagaimana pandangan pemilih terhadap kebijakan konservasi tertentu. Dilanjutkan dialog dengan legislator mengenai cara menerjemahkan aspirasi publik ke dalam prioritas legislasi dan strategi keterlibatan politik. FGD ini juga akan membahas potensi survei lanjutan untuk memantau perubahan opini publik, sekaligus memperluas fokus konservasi dari isu kelautan ke keanekaragaman hayati daratan, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan iklim.

B. Dasar Kegiatan

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KU.02.02/ST/KSOI/ST/09/2025.

C. Peserta dan Panelis FGD

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.	F. PKS	Ketua BKSAP
2.	Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, M.Comn&MediaSt.	F.PDIP	Wakil Ketua BKSAP
3.	Ravindra Airlangga, B.A., M.S.	F. Golkar	Wakil Ketua BKSAP
4.	M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.	F. Gerindra	Wakil Ketua BKSAP
5.	Bramantyo Suwondo, M.IR	F. Demokrat	Wakil Ketua BKSAP
6.	Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M.	F.PDIP	Anggota BKSAP
7.	Abraham Sridjaja, S.H., M.H., C.L.A.	F. Golkar	Anggota BKSAP
8.	Dr. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.	F. Golkar	Anggota BKSAP
9.	Amelia Anggraini	F. NASDEM	Anggota BKSAP
10.	Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P.	F. PKB	Anggota BKSAP
11.	Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A.	F. PKS	Anggota BKSAP
12.	Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E.	F. PKS	Anggota BKSAP
13.	Sigit Purnomo, S.A.P.	F.PAN	Anggota BKSAP
14.	Fathi	F. Demokrat	Anggota BKSAP

15.	Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.	F. Demokrat	Anggota BKSAP
-----	---	-------------	---------------

Panelis atau narasumber dari FGD ini adalah:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Burhanuddin Muhtadi	Direktur Eksekutif, Indikator Politik Indonesia
2.	Seth Soderborg	Ph.D. in Government, Harvard University

D. Tujuan Kegiatan

Focus Group Discussion ini diselenggarakan dengan tujuan;

1. Menginformasikan kepada anggota DPR ihwal persepsi publik atas konservasi kelautan.
2. Menunjukkan potensi dukungan elektoral dari isu konservasi kelautan dan hal-hal yang terkait dengannya.
3. Mendorong kebijakan berbasis bukti.
4. Mengidentifikasi survei lanjutan mengenai isu-isu yang berkaitan erat dengan konservasi kelautan seperti isu konservasi daratan dan perubahan iklim.
5. Membangun komunikasi strategis antarinstansi terkait (*stakeholders*) mengenai isu konservasi kelautan dan topik-topik yang berkaitan erat dengannya.

E. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Serangkaian persiapan Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya pelaksanaan kegiatan. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi disiapkan oleh tenaga ahli BKSAP DPR RI setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait.

II. ISI LAPORAN

A. Agenda FGD

Agenda FGD BKSAP DPR RI “Dampak Pemilih terhadap Kebijakan Konservasi DPR RI”

Waktu	Agenda	Catatan
12:00 - 13:00	Kedatangan dan <i>Networking</i> Lunch	<i>(Diskusi akan diawali dengan makan siang bersama)</i>
13:00 - 13:05 (5 menit)	Sambutan Pembukaan dari The ICCF Group	James Ward <i>Asia Director, The ICCF Group</i>
13:05 - 13:15 (10 menit)	<i>Keynote Speech</i> oleh Pimpinan BKSAP DPR RI	Mardani Ali Sera (TBC) <i>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</i>
13:15 - 13:25 (10 menit)	<i>Keynote Speech</i> oleh Co-chair Kaukus Konservasi	TBC
13:25 - 14:10 (45 menit)	Presentasi Hasil Survei	Analisis respons pemilih terkait kebijakan kelautan, lingkungan, pendanaan konservasi, serta sikap terhadap pilihan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Prof. Burhanuddin Muhtadi <i>Direktur Eksekutif, Indikator Politik Indonesia & Seth Soderborg Ph.D. in Government, Harvard University</i>
14:10 - 15:10 (60 menit)	Refleksi dan tanggapan oleh anggota DPR RI + <i>Group Discussion</i>	Moderator: Prof. Burhanuddin Muhtadi <i>Direktur Eksekutif, Indikator Politik Indonesia</i>
15:10 - 15:25 (10 menit)	Langkah Selanjutnya dan Penutup	Kaukus Konservasi / James Ward

B. Jalannya FGD

1. Pembukaan

a. James Ward, Asia Director, The ICCF Group

Dalam sambutannya, **Asia Director of the ICCF Group James Ward menyampaikan**, proyek survei persepsi dengan topik konservasi kelautan telah dipersiapkan selama dua tahun yang bekerja sama dengan pakar dari National University of Singapore, Princeton University, dan Indikator.

Ia kemudian menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi pemilih terkait konservasi dan lingkungan memengaruhi pilihan politik mereka.

Dijelaskan pula bahwa data yang dipresentasikan bertujuan menjembatani kesenjangan antara warga yang merasakan langsung dampak perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati dengan hak demokratis mereka untuk memilih pemimpin yang memprioritaskan konservasi.

Pada sisi lain, Ward mengatakan bahwa diskusi berikutnya akan membahas model pembiayaan inovatif (seperti impact bonds, coral bonds, dan komitmen internasional) untuk menempatkan konservasi sebagai investasi masa depan Indonesia.

Menurutnya, rencana ke depan adalah menyelenggarakan FGD sebelum akhir tahun dan melakukan misi lapangan untuk mempelajari kemitraan konservasi yang sukses, baik di Indonesia maupun di luar negeri.



Asia Director of the ICCF Group James Ward menyampaikan sambutan di sesi pembukaan FGD.
Dok: BKSAP

b. Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP DPR RI

Sementara itu **Dr. Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP**, dalam sambutan singkatnya menegaskan bahwa acara FGD ini sangat bermanfaat karena bertujuan untuk menganalisa *brief policy* terkait konservasi kelautan.

Pada sisi lain ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan isu *climate change*. Ia menyampaikan juga bahwa Indonesia menghadapi tantangan bagaimana melakukan pendekatan untuk mengatasi isu tersebut.

Di akhir sambutannya Mardani menyimpulkan bahwa sebuah kebijakan yang lebih baik akan menciptakan implementasi yang lebih baik, dan pada akhirnya akan memberikan kemaslahatan bagi publik.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan sambutan di sesi pembukaan FGD.
Dok: BKSAP

2. Paparan

Selanjutnya acara FGD dimoderatori oleh **Profesor Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia**. Ia kemudian langsung meminta **Seth Soderborg Ph.D.**, untuk mempresentasikan hasil surveinya.

Di awal presentasinya dijelaskan bahwa survei ini dilakukan dengan responden online, bukan langsung terjun ke lapangan. Dijelaskan pula bahwa survei persepsi ini memiliki Margin of Error +/-2,43 persen dengan 1.650 responden dan penarikan sampel tanggal 10 – 16 Oktober 2024.

Catatan lain yang diberikan Soderborg bahwa karena survei ini dilakukan secara online, jumlah responden dari kelas bawah belum representatif pada saat sampel ditarik, termasuk para nelayan.

Namun ia menjamin survei ini cukup kredibel karena hasil survei ini didasarkan pada data yang telah dibobot besar agar demografi sesuai dengan populasi Indonesia.

Kemudian disampaikan hal paling penting dari presentasinya tersebut adalah sejumlah temuan atau kesimpulan yang diperoleh dari survei persepsi tersebut.



Panelis Seth Soderborg Ph.D menyampaikan paparan di hadapan peserta FGD. Dok: BKSAP

Adapun temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan laut dan kebijakan konservasi laut didukung mayoritas besar pemilih.
 - Termasuk pertanyaan yang meningkatkan risiko keterlambatan pembangunan ekonomi.
- b. Dukungan perlindungan laut tinggi di banyak kelompok demografi
 - Tidak hanya nelayan atau orang yang tinggal di pinggir laut, tapi juga orang yang berada di kota besar

- Gen-X sangat peduli terhadap isu-isu perlindungan laut
- c. Pemilih yang sangat tertarik pada isu-isu laut merupakan pemilih yang berpengaruh
- Upaya perlindungan laut dapat menjadi salah satu pembeda bagi seorang legislator dengan yang lain



Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof Burhanudin Muhtadi bertindak sebagai moderator FGD. Dok: BKSAP

Setelah sesi pemaparan hasil survei, moderator sekaligus didaulat sebagai penanggung menyampaikan sejumlah catatan penting antara lain:

- Mengingat hampir seluruh responden mendukung perlindungan laut atau lebih 80 persen, maka dapat disimpulkan bahwa isu kelautan sangat tinggi. Namun demikian perlu dijelaskan kenapa dukungan tersebut sangat tinggi;
- Secara metodologi survei *online* ini meyakinkan;
- Didasarkan pada survei terkait perubahan iklim dengan responden populasi anak muda pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Politik Indikator, ditemukan bahwa secara merata anak muda Indonesia sangat peduli terhadap perubahan iklim terlepas dari perbedaan tingkatan pendidikannya. Hal tersebut karena banyak dari populasi anak muda tersebut terkoneksi dengan berbagai platform media social;

- d. Gagasan survei lanjutan dengan fokus pertanyaan kepada dua hal yaitu pilihan prioritas konservasi atau ekonomi;
- e. Membawa isu ekonomi ke ranah elektoral pada saat ini masih diperdebatkan terkait apakah isu ekonomi benar-benar akan menarik dukungan signifikan atau tidak;
- f. Saat ini di Indonesia platform ekonomi parpol-parpol tidak ada perbedaan;
- g. Di beberapa negara seperti Belanda tercatat sejumlah parpol mulai tertarik untuk berkoalisi dengan partai hijau. Hal tersebut karena di sejumlah negara perbedaan ideologi antarpol sangat kontras terlihat. Sementara di Indonesia sendiri yang baru terlihat adalah isu agama;
- h. Di Indonesia belum terdapat parpol yang serius menjajakan isu lingkungan, padahal demand side isu lingkungan sangat potensial tapi *supply side* alias parpol tidak terllu peduli terkait lingkungan;
- i. Ke depan harus diteliti bagaimana isu lingkungan menjadi isu electoral, termasuk membungkus isu konservasi dengan dengan isu ekonomi;
- j. Penting dicatat dari survei persepsi ini adalah bahwa mereka yang tertarik isu politik juga tertarik isu kelautan seperti isu pagar laut dan pertambangan Raja.

Setelah moderator sekaligus penanggap menyampaikan catatan-catatannya, para peserta FGD kemudian memberikan beragam tanggapan yang berbentuk komentar dan pertanyaan.

3. Catatan dari Peserta FGD

- a. Diharapkan ke depan DPR dapat menghasilkan produk hukum dengan berbasis sains.
- b. Diperlukan lebih mendalam untuk melakukan intervensi sains dan teknologi dalam berbagi proses politik termasuk terkait potensi elektoral.
- c. Menyoroti isu konservasi kelautan merupakan isu yang tidak relevan bagi dapil yang landlock. Oleh sebab itu ke depan perlu dilakukan survei yang lebih luas termasuk konservasi daratan.
- d. Tantangan Indonesia saat ini adalah minimnya alokasi anggaran negara untuk konservasi termasuk konservasi kelautan. Tidak hanya itu, alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan yaitu Rp 1,8 triliun untuk tahun 2024 menjadi Rp 1,5 triliun untuk tahun 2025.

- e. Laut bagi Indonesia merupakan sumber kehidupan dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti termaktub dalam konstitusi. Terlebih lagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Oleh karena itu, Indonesia harus memfokuskan untuk menjadikan laut bagi kesejahteraan nelayan. Pasalnya, kelompok nelayan sering kali identik sebagai kelompok miskin.
- f. Menyoroti urgensi menjadikan isu konservasi atau lingkungan sebagai salah satu fondasi kebijakan parpol. Oleh sebab itu agar ICCF menjalin kerja sama lebih erat dengan parpol-parpol di Indonesia termasuk menyampaikan gagasan-gagasannya ke parpol-parpol tersebut.
- g. Ditengarai tingkat kesadaran lingkungan akan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat.
- h. Mendorong agar kebijakan konservasi dipandang sebagai strategi untuk penguatan UMKM, ekonomi dan pariwisata, ekonomi kreatif dan pariwisata keberlanjutan, sehingga isu konservasi dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- i. Meminta ICCF ke depan dalam melakukan agenda-agendanya untuk lebih banyak melibatkan media termasuk dalam surveinya.
- j. Mendorong isu konservasi agar masuk ke dalam manifes parpol-parpol di Indonesia pada 2029.



Suasana FGD Voter Impact on DPR RI Conservation Policy. Dok: BKSAP

- k. Ditengarai isu konservasi berkaitan erat dengan dampak dari market global. Oleh karena itu, isu konservasi tidak bisa dipisahkan dari kebijakan ekonomi khususnya di level global.
- l. Mengingatkan bahwa jumlah pemilih dari generasi Z sekitar 60 juta jiwa. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seharusnya isu konservasi sangat prospek untuk dijual. Namun demikian fakta di lapangan ternyata para pemilih akan lebih melihat apa yang di depan mata atau pilihan yang pragmatis.
- m. Di beberapa kasus masih ditemukan di grassroot di Karimunjaya yang merusak lingkungan terutama sampah yang dihasilkannya yang dilemparkan ke laut. Demikian saat pelarangan penggunaan cantrang saat menangkap ikan di laut yang mendapat penentangan dari public meski cantrang tersebut dapat merusak ekosistem laut.
- n. 14. DPR harus mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk konservasi. Bercermin dari program MBG yang menelan anggaran Rp 335 triliun, maka sejatinya anggaran konservasi pun dapat ditingkatkan dan itu tergantung kepada politik anggaran.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI turut menjadi peserta FGD Voter Impact on DPR RI Conservation Policy.

Dok: BKSAP

4. Pertanyaan dari Peserta FGD

Selain komentar-komentar yang terlontar, peserta FGD juga mengajukan sejumlah **pertanyaan** yaitu:

- a. Bagaimanakah DPR untuk mencari instrument pembiayaan yang inovatif bagi konservasi?
- b. Dampak konservasi belum dapat memberikan dampak ekonomi bagi rakyat. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut?
- c. Apakah ada analisi terkait hubungan antara isu politik dengan politik uang atau money politics?
- d. Apakah ada hasil studi bahwa 80 persen generasi Z memilih kandidat presiden yang peduli lingkungan pada pemilihan presiden terbaru?



Anggota BKSAP DPR RI aktif berdiskusi dengan panelis FGD. Dok: BKSAP

5. Jawaban dari Panelis

Terkait sejumlah komentar dan pertanyaan di atas, narasumber dan penanggung menyampaikan responnya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengalaman survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks politik, isu lingkungan sudah mulai menarik perhatian publik.
- b. Terkait alokasi anggaran konservasi, mutlak diperlukan strategi komunikasi yang atraktif, seperti bagaimana meyakinkan pemilih bahwa isu lingkungan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada konstituen.
- c. Diharapkan kebijakan yang pro konservasi atau lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang tepat sehingga tidak memicu resistensi publik, antara lain diperlukan ruang transisi yang memadai sebagai proses adaptasi.
- d. Pada tahun 2024 diperkirakan generasi Z dan milenial sekitar 26 persen dari total pemilih. Ke depan jumlah tersebut akan semakin besar dan itu maknanya bahwa isu lingkungan akan semakin mendapatkan perhatian lebih besar. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR harus semakin responsif atas isu konservasi dan lingkungan.
- e. Saat ini belum ada parpol di Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan. Lebih jauh, isu konservasi harus menjadi kesadaran kolektif dan isu multipartisan.
- f. Perhatian masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan saat ini tidak diimbangi oleh respon Pemerintah yang memadai. Ini menandakan ada diskoneksi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diadopsi. Padahal ciri *democratic government* adalah bagaimana kebijakan dapat menyerap aspirasi arus bawah.
- g. Isu lingkungan masih susah dijual ke pemilih karena politik uang di Indonesia saat ini seperti *entry ticket*, yakni bahwa semua peserta harus membayar kalau ia menginginkan kemenangan dalam ranah politik. Padahal efek elektoral politik uang tersebut tidak terlalu besar atau kecil yakni sekitar 11 persen. Meski kecil, namun money politics masih sangat menentukan karena pemilu legislatif yang dianut adalah sistem proporsional terbuka yang memicu tingkat persaingan antarindividu semakin ketat termasuk di antara internal parpol.
- h. Saat ini semua calon anggota legislatif (caleg) sangat mengandalkan kekuatan finansial atau money politics. Namun demikian ini merupakan peluang bahwa caleg yang menjual isu konservasi atau lingkungan akan menjadi faktor pembeda atau nilai tambah.
- i. Akselerasi kesadaran isu lingkungan akan lebih cepat dengan mendorong perubahan elit politik agar lebih perhatian terhadap lingkungan. Perubahan

dari bawah dengan puluhan juta pemilih tentu akan jauh lebih sulit dan lama.

- j. ICCF Group saat ini bersama BKSAP akan menyusun *white paper on blue economy*.
- k. ICCF Group juga merencanakan proyek survei dengan responden 4000 orang di Jawa dengan fokus apakah dasar memilih tersebut karena konservasi atau agama serta bagaimana pemikiran mereka tentang perubahan iklim.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan FGD dengan topik *Voter Impact on DPR RI Conservation Policy* di Tangerang pada 24 September 2025 tersebut berjalan lancar, sangat positif, produktif, dan interaktif. Pertemuan yang digelar sangat dinamis dan secara substantial telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terutama bagi peningkatan peran BKSAP DPR dalam mendukung konservasi kelautan secara khusus dan lingkungan secara lebih luas.

Para peserta FGD telah dengan sangat aktif dan kritis menyampaikan berbagai pandangan yang menggambarkan kepentingan nasional terkait komitmen dan upaya untuk mendukung konservasi.

B. Saran

1. Mencatat, mencermati, dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari hasil survei persepsi tersebut.
2. BKSAP diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut setidaknya dengan dua tahapan berikut: (1) Membincangkan dan mendiskusikannya dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam kerangka keberlanjutan posisi DPR terkait dukungan upaya-upaya konservasi; (2) Menyampaikan hasil survei dan beberapa hal penting lainnya ke seluruh *stakeholder* terutama komisi-komisi terkait di DPR.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Rangkaian kegiatan FGD BKSAP DPR RI dengan tema *Voter Impact on DPR RI Conservation Policy* yang berlangsung di Tangerang, 24 September 2025 menggunakan mata anggaran MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC.001.051.D.524111 sebesar Rp243.914.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

B. Keterangan dan Lampiran

1. Lampiran dan bahan paparan
2. Foto dokumentasi ([link](#))
3. Publikasi Media
 - a. [Ketua BKSAP DPR RI: Isu Konservasi Harus Jadi Perhatian dalam Kebijakan Publik](#)
 - b. [BKSAP: Survei Publik Harus jadi RUjukan Konservasi Laut](#)

C. Ucapan terimakasih

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengucapkan terima kasih atas terlaksananya FGD ini, semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung dan menunjang program pemerintah di kancah global.

D. Kata pentup

Demikian pokok-pokok laporan Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI yang bekerja sama dengan ICCF Group dan Indikator Politik Indonesia yang mengangkat tema *Voter Impact on DPR RI Conservation Policy* yang berlangsung di Tangerang, 24 September 2025, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2025
Ketua BKSAP DPR RI

Dr. MARDANI ALI SERA



LAMPIRAN

Kerangka Acuan (*Terms of Reference*)

Dampak Pemilih terhadap Kebijakan Konservasi DPR-RI

JHL Solitaire, Gading Serpong | 24 September 2025 | 13.00 WIB

Gambaran Umum

Riset opini publik terbaru yang didukung oleh ICCF Group menunjukkan bahwa pemilih Indonesia semakin menempatkan konservasi, khususnya kesehatan laut, sebagai isu penting, dan faktor ini memengaruhi cara mereka menilai calon anggota DPR-RI. Survei ini menegaskan bahwa isu lingkungan dan kelautan bukan hanya sekadar isu teknis, melainkan isu yang memiliki relevansi isu politik nyata di mata pemilih. Kondisi ini membuka peluang, sekaligus menegaskan peran bagi DPR-RI, khususnya anggota Kaukus Konservasi, untuk memberikan respons melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Paparan ini akan menyampaikan temuan utama dari survei yang dilakukan pada pertengahan 2024 dengan fokus utama untuk melihat bagaimana pandangan pemilih terhadap kebijakan konservasi tertentu, serta membuka ruang dialog dengan legislator mengenai cara menerjemahkan aspirasi publik ke dalam prioritas legislasi dan strategi keterlibatan politik. Acara ini juga akan membahas potensi survei lanjutan untuk memantau perubahan opini publik, sekaligus memperluas fokus konservasi dari isu kelautan ke keanekaragaman hayati daratan, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan iklim.

Tujuan:

1. **Memberi informasi kepada Anggota Parlemen:** Menyajikan data mengenai persepsi publik atas perlindungan laut dan lingkungan kepada Kaukus Konservasi DPR-RI.
2. **Relevansi Fungsi Parlemen:** Menunjukkan potensi manfaat elektoral dari dukungan terhadap kebijakan konservasi, khususnya terkait laut, perikanan, dan keanekaragaman hayati.
3. **Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti:** Membekali anggota dengan wawasan berbasis data yang dapat memperkuat fungsi DPR-RI dalam pengawasan anggaran, pembentukan undang-undang, dan keterlibatan konstituen.
4. **Mengidentifikasi Prioritas ke Depan:** Mengeksplorasi peluang untuk memperluas fokus pada konservasi di darat dan isu iklim dalam survei berikutnya maupun inisiatif kaukus.
5. **Membangun Komunikasi Strategis:** Membantu anggota kaukus merumuskan konservasi sebagai isu yang dekat pemilih dan mengaitkannya pada tujuan pembangunan nasional serta penghidupan masyarakat lokal.

Rincian Acara

Tanggal: 24 September 2025
Waktu: 13:00 - Selesai
Tempat: JHL Solitaire Hotel
Jl. Gading Serpong Boulevard Blok S No. 5, Banten 15810

Pembicara

Prof. Burhanuddin Muhtadi

Direktur Eksekutif, Indikator Politik Indonesia

Burhan adalah pakar survei berpengalaman dengan lebih dari sepuluh tahun keterlibatan dalam survei politik di Indonesia. Di Indikator Politik Indonesia, salah satu lembaga riset opini publik terkemuka, beliau berfokus pada perilaku pemilih, komunikasi politik, serta polling berbasis isu. Ia berperan penting dalam pelaksanaan serta interpretasi hasil survei konservasi ini.



Seth Soderborg

Ph.D. in Government, Harvard University

Seth adalah peneliti politik yang meneliti opini publik, perilaku politik, dan perkembangan demokrasi. Saat di Harvard, ia meneliti bagaimana pemilih menafsirkan pilihan kebijakan serta bagaimana isu konservasi memengaruhi keterlibatan politik. Ia turut merancang dan menginterpretasi survei pemilih Indonesia 2024 mengenai isu kelautan dan lingkungan, dengan menghadirkan ketelitian metodologis serta perspektif komparatif dalam proyek ini.



Struktur Survei

Survei persepsi pemilih ini disusun untuk memahami bagaimana warga negara Indonesia memandang konservasi, khususnya isu-isu kelautan, serta bagaimana pandangan tersebut dapat memengaruhi pilihan mereka ketika memilih calon anggota DPR-RI. Survei ini dilakukan melalui kemitraan dengan Indonesia Study Group 2024, difasilitasi oleh indonesiaproject.net, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong keterlibatan legislatif berbasis data dalam kebijakan lingkungan dan kelautan.

Catatan mengenai peran Indikator: Indikator bukan pelaksana survei, tetapi berperan sebagai peneliti dalam analisis dan penyebaran policy brief ini.

Pertanyaan Framing

Banyak masyarakat Indonesia yang peduli terhadap isu lingkungan, termasuk menjaga laut kita tetap bersih dari polusi dan sampah plastik. Namun, sebagian berpendapat bahwa regulasi pemerintah untuk melindungi lingkungan dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Pernyataan berikut mana yang paling mendekati pandangan Anda?

- Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memprioritaskan perlindungan laut dari bahaya pencemaran laut, meskipun hal ini dapat memperlambat pembangunan ekonomi.
- Pemerintah Indonesia seharusnya memprioritaskan pembangunan ekonomi, meskipun berdampak pada pencemaran laut.

Lima pertanyaan mengenai dukungan kebijakan: seluruhnya menanyakan tingkat persetujuan (sangat setuju hingga sangat tidak setuju) terhadap tindakan pemerintah berikut:

- Pendanaan Kawasan Konservasi Laut
- Kuota perikanan tangkap
- Dukungan bagi koperasi nelayan kecil
- Pendanaan untuk promosi keanekaragaman hayati
- Dukungan kepada daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan konservasi (misalnya BLU/D)

Hasil yang Diharapkan

- Meningkatnya kesadaran di kalangan Anggota DPR-RI mengenai dukungan pemilih terhadap kebijakan konservasi.
- Teridentifikasinya tema konservasi prioritas bagi kerja kaukus dan agenda legislasi.
- Menguatnya argumen untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam platform politik DPR-RI.
- Adanya komitmen untuk memperdalam keterlibatan parlemen dalam isu konservasi kelautan maupun isu lingkungan yang lebih luas.
- Terbangunnya landasan untuk penelitian lanjutan dan strategi komunikasi yang selaras dengan sentimen publik.

Rencana Tindak Lanjut

- **Menyebarkan temuan utama kepada Anggota DPR-RI**, khususnya Kaukus Konservasi dan komisi terkait (misalnya BKSAP, Komisi IV, VII, XI), melalui ringkasan cetak maupun digital.
- **Menyusun *Legislative Talking Points* bagi anggota DPR berdasarkan hasil survei**, dengan mengaitkan konservasi pada peluang ekonomi dan kesesuaian dengan aspirasi pemilih.
- **Mengusulkan adanya Resolusi/Pernyataan dari Kaukus Konservasi** yang menegaskan pentingnya integrasi konservasi dalam prioritas pembangunan nasional.
- **Melibatkan platform partai politik untuk mengeksplorasi** bagaimana konservasi dapat tercermin dalam manifesto partai menjelang siklus pemilu berikutnya.
- **Mengusulkan Sekretariat dan Tenaga Ahli DPR untuk menindaklanjuti** perubahan opini publik serta menguji respons terhadap kebijakan atau kampanye tertentu.

Pertanyaan Diskusi Kelompok

Fungsi Legislatif
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana temuan ini dapat diterapkan dalam kebijakan legislasi? 2) Apa arti temuan ini bagi kerja DPR melalui Prolegnas dan keterlibatan dengan konstituen? 3) Bagaimana prioritas konservasi dapat dipastikan masuk dalam Prolegnas sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional? 4) Apakah temuan ini menunjukkan perlunya merevisi undang-undang yang sudah ada (misalnya UU Perikanan, UU Kelautan, UU Lingkungan Hidup) atau bahkan merumuskan kerangka baru, seperti RUU Ekonomi Biru, untuk mendorong prioritas konservasi?
Fungsi Anggaran
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana DPR dapat menggunakan temuan ini untuk memengaruhi alokasi anggaran (misalnya untuk KKLD, perikanan skala kecil, atau program keanekaragaman hayati)? 2) Bagaimana DPR dapat memastikan bahwa alokasi anggaran konservasi secara langsung memberi manfaat kepada konstituen, khususnya masyarakat pesisir dan pedesaan? 3) Instrumen fiskal apa (misalnya BLU atau pembiayaan inovatif seperti <i>blue bonds</i>) yang dapat dimobilisasi untuk menyelaraskan anggaran negara dengan preferensi pemilih terkait konservasi?
Fungsi Pengawasan
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana model kaukus dapat berkontribusi dalam memperoleh pengakuan dan kredit atas langkah DPR di bidang kebijakan konservasi? 2) Narasi atau pesan apa, berdasarkan survei ini, yang paling efektif di kalangan konstituen untuk memperkuat keterlibatan politik anggota DPR? 3) Mekanisme survei tambahan atau umpan balik konstituen apa yang paling bermanfaat untuk memandu pengambilan keputusan terkait konservasi? 4) Bagaimana DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya kepada kementerian (Perikanan, Kehutanan, Lingkungan Hidup) dalam pelaksanaan anggaran dan kebijakan konservasi? 5) Mekanisme apa yang dapat dikembangkan untuk memantau serta menyampaikan kembali hasil konservasi kepada pemilih, guna membangun kepercayaan dan kredibilitas? 6) Bagaimana anggota DPR dapat melawan misinformasi atau resistensi yang menggambarkan konservasi sebagai penghambat pembangunan ekonomi?
Keterlibatan Konstituen dan Pesan Politik
<ol style="list-style-type: none"> 1) Narasi atau pesan apa, berdasarkan survei ini, yang paling efektif menggema di kalangan konstituen untuk memperkuat keterlibatan politik anggota DPR? 2) Mekanisme survei tambahan atau umpan balik konstituen apa yang paling bermanfaat untuk memandu pengambilan keputusan terkait konservasi? 3) Bagaimana anggota kaukus dapat memanfaatkan hasil survei ini untuk memengaruhi manifesto partai masing-masing menjelang Pemilu 2029?

AGENDA Dampak Pemilih terhadap Kebijakan Konservasi DPR-RI JHL Solitaire Hotel, Gading Serpong 13:00 WIB - Selesai		
Waktu (WIB)	Agenda	Catatan
12:00 - 13:00	Kedatangan dan <i>Networking Lunch</i>	<i>(Diskusi akan diawali dengan makan siang bersama)</i>
13:00 - 13:05 (5 menit)	Sambutan Pembukaan dari The ICCF Group	James Ward <i>Asia Director, The ICCF Group</i>
13:05 - 13:15 (10 menit)	<i>Keynote Speech</i> oleh Pimpinan BKSAP DPR RI	Mardani Ali Sera (TBC) <i>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</i>
13:15 - 13:25 (10 menit)	<i>Keynote Speech</i> oleh Co-chair Kaukus Konservasi	TBC
13:25 - 14:10 (45 menit)	Presentasi Hasil Survei	<p>Analisis respons pemilih terkait kebijakan kelautan, lingkungan, pendanaan konservasi, serta sikap terhadap pilihan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>Prof. Burhanuddin Muhtadi <i>Direktur Eksekutif, Indikator Politik Indonesia</i> & Seth Soderborg <i>Ph.D. in Government, Harvard University</i></p>
14:10 - 15:10 (60 menit)	Refleksi dan tanggapan oleh anggota DPR RI + <i>Group Discussion</i>	<p>Moderator:</p> <p>Prof. Burhanuddin Muhtadi <i>Direktur Eksekutif, Indikator Politik Indonesia</i></p>
15:10 - 15:25 (10 menit)	Langkah Selanjutnya dan Penutup	Kaukus Konservasi / James Ward

Catatan:

Bahasa pengantar acara adalah Bahasa Indonesia.



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id